

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
KPKNL BANDA ACEH
TAHUN 2021



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berjuang dan pulih adalah semangat yang patut disuarakan untuk tahun 2021. Pasalnya tahun 2021 merupakan tahun bangkitnya banyak insan atas banyaknya tantangan yang kita hadapi, tahun ini adalah tahun dimana banyak penyesuaian terhadap banyaknya adaptasi yang kita rasakan. Pemulihan terhadap Covid-19 memang memiliki dampak yang besar bagi seluruh insan, khususnya insan DJKN.

Pelaksanaan vaksin Covid-19 mengawali triwulan awal tahun 2021, penerapan refocusing dan realokasi yang memangkas anggaran agar difokuskan terhadap pemulihan negara, serta berbagai uji upaya dilakukan untuk memulihkan situasi dan keadaan Indonesia. Hal tersebut nyatanya membuahkan hasil berupa perekonomian Indonesia yang pada triwulan II tahun 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19, sebesar 7,07%. Kinerja tersebut melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan I tahun 2021.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pada tahun pemulihan ini pula untuk pertama kali sejak tahun 2019 KPKNL Banda Aceh mencapai seluruh capaian dengan sempurna. Tentunya, semua ini tidak terlepas dari seluruh insan KPKNL Banda Aceh dari Kepala Kantor sampai pelaksana dengan semangat yang lebih membara dari tahun sebelumnya untuk bangkit dan bekerja keras menjalankan menyelesaikan Kontrak Kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021. Hasil dari komitmen kami, akan dilaporkan dan disusun pada Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Banda Aceh Tahun 2021 ini.

Terucap puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja KPKNL Banda Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan kepada KPKNL Banda Aceh selama tahun 2021.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai instansi pemerintah perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 dilakukan berdasarkan realisasi IKU Kemenkeu-Wide Tahun 2021 yang di-cascade secara langsung maupun tidak langsung dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Banda Aceh. Rata-rata capaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2021 (Nilai Kinerja Organisasi) adalah sebesar 112,47 % dari 10 Sasaran Strategis (SS) dengan total 19 IKU. Secara keseluruhan IKU yang dicapai pada tahun 2021 melampaui target yang telah ditetapkan.

LAKIN KPKNL Banda Aceh Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Banda Aceh serta upaya meningkatkan kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang untuk menjawab semakin tingginya harapan masyarakat atas kinerja dan pelayanan birokrasi.

Akhir kata, kepada seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh, diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya agar mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami membuka diri atas segala saran dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terimakasih
Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Banda Aceh, 28 Januari 2021
Kepala Kantor,



Muhammad Indra Kesuma



RINGKASAN EKSEKUTIF

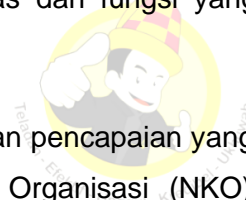
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). KPKNL Banda Aceh sebagai ujung tombak pelayanan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjadikan laporan kinerja sebagai alat kontrol, alat pengukuran kinerja sesuai dengan tujuan organisasi, dan alat pemacu dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

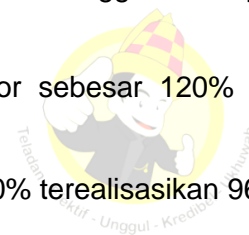
Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2021 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPKNL Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2021 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis DJKN 2020-2024, terdapat 4 tujuan pokok dalam kerangka pembangunan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 yakni Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal, dan produktif; Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; serta Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Berdasarkan strategi-strategi yang termaktub dalam Rencana Strategis, KPKNL Banda Aceh menyusun Kontrak Kinerja yang di dalamnya memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU inilah yang kemudian menjadi alat kontrol kuantitatif dalam pengukuran berhasil atau tidaknya KPKNL Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

Sepanjang tahun 2021, KPKNL Banda Aceh telah menorehkan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihasilkan berdasarkan capaian IKU, yaitu sebagai berikut:



- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 113,88% dengan realisasi 70,61% dari target 62%
- b. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 120% dengan realisasi 127,20% dari target 100%
- c. Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017) sebesar 120% atau pencapaian 140,43% dari target 100%
- d. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang terealisasi sebesar 98,95 atau dengan nilai 112,44% dari target sebesar 88
- e. Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) mencapai 120,35% dengan pencapaian nilai 120% dari target 100%
- f. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL sebesar 106,89% atau pencapaian 4,81 dari target sebesar 4,5
- g. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan sebesar 101,32% dari target 100%
- h. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) sebesar 100% dari target 100%
- i. Deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 120% dari target 22% tercapai 0%
- j. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN sebesar 120% dari target 100% terealisasi 121,95%
- k. Persentase produktivitas lelang sebesar 120% atau realisasi sebesar 48,84% dari target 35%
- l. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction 108,70%% atau 100% dari target 92%
- m. Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN tercapai 120% dengan realisasi 0% dari batas maksimal sebesar 12,5%
- n. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 104,23% dari target 91% tercapai 94,85%
- o. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset sebesar 101,01% atau capaian 85,86% dari target 85%
- p. Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi 120% dari target 100%
- q. Nilai hasil review pengelolaan kinerja dari target 75 tercapai 90 hingga mendapat nilai 120%
- r. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator sebesar 120% dengan realisasi sebesar 98,53 dari target 80
- s. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dari target 95,50% terealisasikan 96,60%



Seluruh capaian pencapaian IKU pada tahun 2021 memenuhi target sesuai dengan target, bahkan pada beberapa IKU melebihi target yang telah ditetapkan sehingga pencapaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 seluruhnya berstatus hijau, dengan hasil penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,47% dari nilai maksimal 120%.

KPKNL Banda Aceh sebagai kantor yang sedang terus bergerak maju, tidak terlena dengan hasil pencapaian yang telah diraih, malah membuat seluruh pegawai semakin antusias dan bersemangat untuk memberikan kontribusi nyata yang optimal, inovasi yang aplikatif, dan ide-ide terbaik di tahun berikutnya.



DAFTAR ISI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
C. WILAYAH KERJA KPKNL BANDA ACEH	14
D. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA KPKNL BANDA ACEH.....	14
E. ISU-ISU STRATEGIS (KEUNGGULAN, TANTANGAN DAN PERMASALAHAN)	15
F. SISTEMATIKA LAPORAN	16
BAB II	18
BAB III	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
1. TARGET DAN REALISASI KINERJA KPKNL BANDA ACEH TAHUN 2021	21
2. TARGET DAN REALISASI KINERJA KPKNL BANDA ACEH TAHUN 2020	27
3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	32
4. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN DALAM PENCAPAIAN TARGET .	39
5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	40
6. ANALISIS ATAS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN	40
7. ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO	41
8. RENCANA AKSI.....	41
B. REALISASI ANGGARAN.....	42
BAB IV.....	46
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2021, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Banda Aceh dari bulan Januari hingga Desember tahun 2021.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh, yang mempunyai kewenangan melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan

Lelang di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Struktur organisasi KPKNL Banda Aceh terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor), dan 7 eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubag Umum).

VISI

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada KPKNL Banda Aceh, seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta Roadmap DJKN to *distinguished Asset Manager* yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020-2024 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, VISI DJKN yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pada Visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan.

Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Adapun Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan dan adaptif, penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN

serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.

- b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara yang berperan penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi”.
- c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional.
- d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum.
- e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya

MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimal) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui MISI sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Tujuan merupakan bagian dari misi yang berupa penjabaran misi organisasi dan merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau diperoleh dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun ke depan. Oleh karena itu, tujuan KPKNL Banda Aceh memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Banda Aceh sesuai dengan Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efektif dan efisien, serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

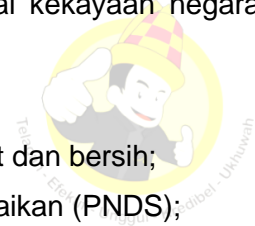
SASARAN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Sasaran strategis untuk mendukung pencapaian tujuan DJKN yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif

Beranjak dari Sasaran DJKN tersebut sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Banda Aceh dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

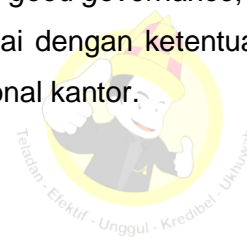
- A. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
 - a. Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara;
 - b. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran;
 - c. Terwujudnya informasi nilai terkini dan nilai potensial kekayaan negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- B. Seksi Piutang Negara
 - a. Terwujudnya pengurusan piutang negara secara sehat dan bersih;
 - b. Tercapainya target piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS);
 - c. Terwujudnya pengelolaan dokumen asli barang jaminan.



- C. Seksi Pelayanan Lelang
 - a. Terselenggaranya pelayanan lelang yang modern, bersih, transparan dan akuntabel;
 - b. Tercapainya target hasil lelang baik dari pokok lelang maupun bea lelang.
 - c. Tercapainya lelang yang produktif
- D. Seksi Pelayanan Penilaian
 - a. Administrasi Seksi Pelayanan Penilaian yang tertib dan berkualitas;
 - b. SDM Penilai yang handal;
 - c. Pelayanan penilaian dalam rangka utilisasi BMN yang optimal;
 - d. Pelayanan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara yang optimal;
 - e. Tersedianya harga pasar yang wajar dalam rangka penyusunan DKPB.
- E. Seksi Hukum dan Informasi
 - a. Tercapainya peningkatan penatausahaan BKPN dan penyajian informasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang;
 - b. Tercapainya optimalisasi penanganan perkara.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif
- F. Seksi Kepatuhan Internal
 - a. Pelaksanaan SOP Unggulan tepat waktu;
 - b. Penyusunan kontrak kinerja yang tepat waktu dan mencerminkan capaian kinerja masing-masing pegawai dan organisasi;
 - c. Mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi beserta langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah;
 - d. Memastikan kode etik dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku dijalankan oleh seluruh pegawai;
 - e. Memastikan hasil pemeriksaan aparat fungsional ditindaklanjuti;
 - f. Laporan hasil pelaksanaan SOP Layanan Unggulan yang andal dan akurat.
- G. Subbagian Umum
 - a. Terlaksananya pemberian dukungan teknis dan administrasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - b. Pelaksanaan DIPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Banda Aceh menyelenggarakan fungsi diantaranya sebagai berikut:



- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. Penyiapan barang pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan Piutang Negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KOMPOSISI PEGAWAI

Untuk menjalankan semua tugasnya, KPKNL Banda Aceh memiliki 31 Pegawai PNS serta didukung oleh 11 Pegawai Non PNS (honorar). Adapun komposisi pegawai PNS pada KPKNL Banda Aceh dapat dipetakan berdasarkan golongan, pendidikan, usia, dan kelompok fungsional.

Tabel I-1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
	A	B	C	D	
II	0	0	7	2	9
III	7	7	3	3	20
IV	2	0	0	0	2
JUMLAH	9	7	10	5	31

Tabel I-2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA / D1	0	1	4	0	5
D3	0	8	1	0	9
D4/S1	0	0	12	1	13
S2	0	0	3	1	4
JUMLAH		9	20	2	31

Tabel I-3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan

USIA	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	9	5	0	14
31-40	0	1	6	0	7
41-50	0	0	2	2	4
Di atas 50	0	0	6	0	6
JUMLAH	0	10	19	2	31

Tabel I-4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin dan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	4	16	1	21
Perempuan	0	5	4	1	10
JUMLAH	0	9	20	2	31

Tabel I-5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Fungsional

UNIT KERJA	Juru Sita	Pejabat Lelang	Pemeriksa	Penilai	Jumlah
Seksi Hukum dan Informasi	0	0	1	0	1
Seksi Kepatuhan Internal	0	0	0	0	0
Seksi Pelayanan Lelang	2	2	1	1	6
Seksi Pelayanan Penilaian	0	0	1	3	4
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	0	0	0	1	1

Seksi Piutang Negara	0	1	1	0	2
Subbagian Umum	1	0	1	0	2
JUMLAH	3	3	5	5	16

C. WILAYAH KERJA KPKNL BANDA ACEH

KPKNL Banda Aceh memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 13 (tiga belas) kota dan/atau kabupaten, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Adapun kota dan kabupaten yang termasuk wilayah kerja KPKNL Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kota Banda Aceh;
- b. Kota Sabang;
- c. Kab. Aceh Besar;
- d. Kab. Aceh Jaya;
- e. Kab. Pidie;
- f. Kab. Pidie Jaya;
- g. Kab. Aceh Barat;
- h. Kab. Nagan Raya;
- i. Kab. Aceh Barat Daya;
- j. Kab. Aceh Selatan;
- k. Kota Subulussalam;
- l. Kab. Aceh Singkil;
- m. Kab. Simeulue

D. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA KPKNL BANDA ACEH

KPKNL Banda Aceh sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

- a. Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- b. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

- a. Membuat usulan atas peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- b. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- c. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara;
- f. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- g. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- h. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

E. ISU-ISU STRATEGIS (KEUNGGULAN, TANTANGAN, DAN PERMASALAHAN)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir DJKN sebagai manajer aset mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa pengembangan organisasi modern pengelola kekayaan negara yang semakin berorientasi pada pelanggan dengan percepatan pelayanan melalui dukungan teknologi informasi yang terus disempurnakan. Sejalan dengan “Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025”, hal ini menandai komitmen DJKN dalam meningkatkan pengelolaan yang lebih baik seiring tuntutan kekinian dalam era transformasi digital (digitalisasi). Digitalisasi merupakan upaya meningkatkan kualitas proses bisnis dalam setiap tahapan manajemen aset dan investasi melalui pembangunan sistem yang andal dan terintegrasi. Pelanggan akan lebih mudah mengajukan permohonan pengelolaan aset dan investasi kepada DJKN sehingga pelayanan dapat dengan cepat ditindaklanjuti.

- a. Sebagai organisasi pembelajar, DJKN terus berupaya mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dilalui sehingga meningkat ke tahapan tingkat lanjut dari manajemen aset (*asset management maturity*). Untuk mewujudkan hal ini secara lebih sistematis dan terukur, mendesain *roadmap* menjadi suatu konsekuensi logis sebagai arahan mencapai cita-cita kondisi paripurna yang diharapkan (*end state*). Berangkat dari penelitian dan pemikiran atas seluruh keunggulan, kelemahan,

peluang, dan tantangan yang dihadapi saat ini, DJKN mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara tugas dan fungsi ideal dan implementasi riil yang saat ini dilakukan (*current state*). Kondisi paripurna manajer aset yang ingin dicapai terbagi kedalam 3 (tiga) hal yaitu: Kekayaan Negara Dikelola Optimal Dan Berkelanjutan, Instrumental Dalam Keuangan Negara, dan Kontributif Dalam Perekonomian Nasional.

- b. Pencapaian yang luar biasa dari KPKNL Banda Aceh atas target yang menantang yaitu Portofolio Aset sebanyak 518 NUP yang merupakan target ketiga terbesar secara nasional dan berhasil menuntaskan sertifikasi sebanyak 921 sertifikat dari target 909 bidang tanah.
- c. Pencapaian tahun ini juga digenapkan dengan berhasilnya capaian pokok lelang dan produktivitas lelang yang tercapai hingga 120% yakni dari target pokok lelang sebesar Rp41.000.000.000 tercapai Rp49.343.882.548 dan target produktivitas 35% tercapai hingga 49%.
- d. Meningkatnya frekuensi lelang berdampak positif dengan peningkatan PNBP akan tetapi berbanding lurus juga dengan peningkatan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang baik yang non TGR ataupun TGR. Perlu adanya regulasi yang lebih tinggi selain PMK atas aturan Lelang karena saat ini telah banyak gugatan yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi terkait Risalah Lelang.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2021 ini terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menjelaskan secara umum KPKNL Banda Aceh, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPKNL Banda Aceh.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun anggaran 2021, termasuk penjelasan adendum kontrak kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target awal tahun, target adendum dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan :
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir
 - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pencapaian kinerjanya
 8. Rencana Aksi ke depan
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Perjanjian Kinerja

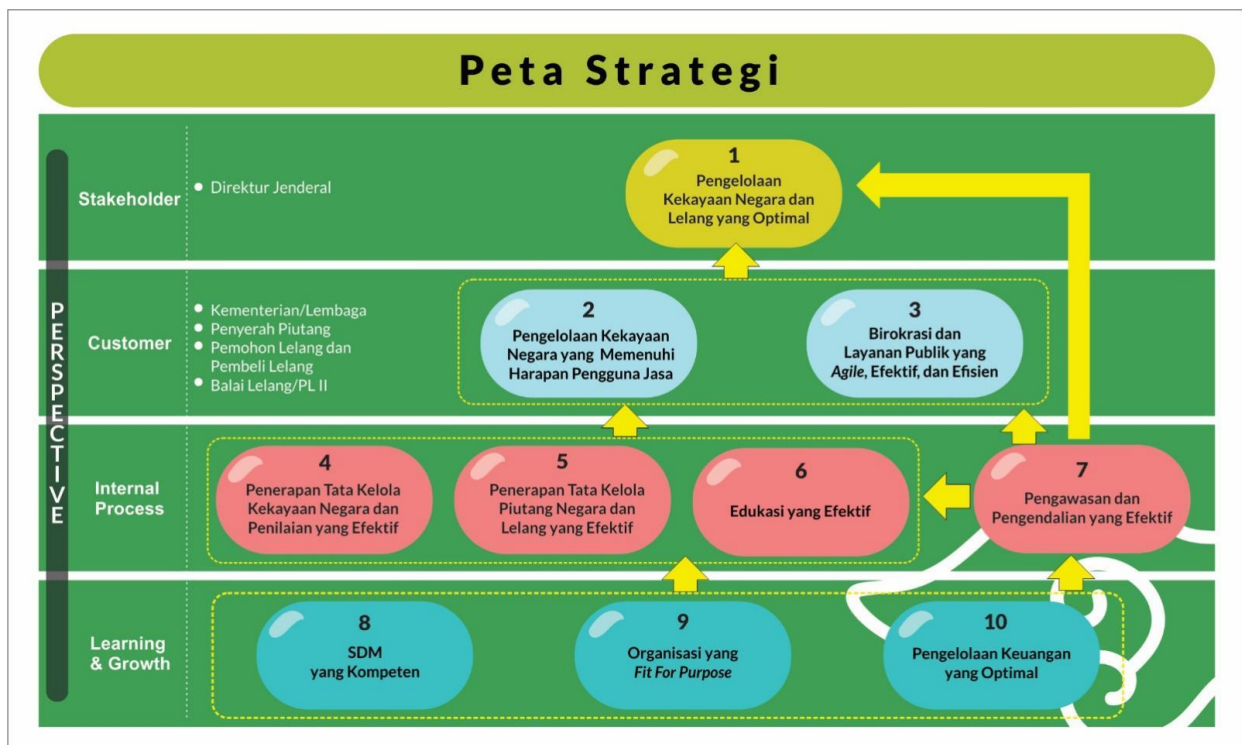


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis KPKNL Banda Aceh merupakan wujud amanat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2015 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 dan penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 239/KN/2019 tentang *Roadmap* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap To A Distinguished Asset Manager*), Berdasarkan Rencana Strategis DJKN2020-2024 yang telah dirumuskan, untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Banda Aceh. Pada perjanjian kinerja tahun 2021, KPKNL Banda Aceh telah menetapkan peta strategi di tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar II-1

Peta Strategi KPKNL Banda Aceh



Perjanjian / kontrak kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Penetapan Kinerja

/ Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Bersamaan dengan telah ditetapkan Peta Strategi, KPKNL Banda Aceh memiliki perjanjian kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor 7.1/KN.13/2021. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel II-1
Kontrak Kinerja Nomor 7/KN.13/2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,5
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	25%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
7.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang fit-for-purpose	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-2689/KN.1/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Usulan Addendum Kontrak Kinerja dan Manual IKU Tahun 2021 dan Nota Dinas dari Kepala Kanwil DJKN Aceh Nomor ND-666/WKN.01/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penetapan Adendum Kontrak Kinerja Pemilik Peta di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh, maka Kontrak Kinerja KPKNL Banda Aceh mengalami Adendum, sebagai berikut :

Tabel II-2

**ADENDUM KONTRAK KINERJA
NOMOR: 7A/KN.13/202**

Bersama ini, ditetapkan kembali *raw data* target manual IKU Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh periode Kontrak Kinerja 2021, yang mengalami perubahan pada:

- A. Perubahan Persentase Penerimaan Negara dari Perolehan Kekayaan Negara dan Lelang (*Raw Data*)

Semula		Menjadi	
PNBP Pengelolaan BMN	: Rp10.717.000.000	PNBP Pengelolaan BMN	: Rp10.717.000.000
PNBP Piutang Negara	: Rp10.874.100	PNBP Piutang Negara	: Rp35.000.000
PNBP Lelang	: Rp1.485.000.000	PNBP Lelang	: Rp1.485.000.000
Total Target IKU	: Rp12.212.874.000	Total Target IKU	: Rp12.237.000.000

- B. Perubahan Persentasi Penurunan Nilai *Outstanding* Piutang Negara (*Raw Data*)

Semula	Menjadi
Total Target IKU:Rp421.613.000	Total Target IKU: Rp791.500.000

Ditetapkan di Banda Aceh, 30 Juli 2021.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai perbandingan antara target dan capaian kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2021 yang dilengkapi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016), sebagai referensi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai hambatan dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat menjadi masukan pada tahun berikutnya. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada tahun 2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi diukur dengan membandingkan data antara target dan realisasi, yang disajikan dalam bentuk persentase. Capaian ini dapat menunjukkan seberapa jauh proses atau kemajuan yang telah didapat dalam periode waktu tertentu.

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA KPKNL BANDA ACEH TAHUN 2021

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (*output*) KPKNL Banda Aceh pada tahun 2021 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

K- Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal						
	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Po/KP
Target sebelum adendum	-	50%	50%	55%	62%	62%	Max / TLK
Target setelah adendum	-	50%	50%	55%	62%	62%	
Realisasi	-	67,54%	67,54%	73,52%	70,61%	70,61%	
Capaian kontrak awal	-	120%	120%	120%	113,88%	113,88%	
Capaian Kontrak adendum	-	120%	120%	120%	113,88%	113,88%	

Note : Target SBSK 2021 merupakan gabungan dari Monev Tingkat Kesesuaian SBSK 20% dengan bobot 25% dan Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021) dengan bobot 75%

K- Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal						
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Po/KP
Target sebelum adendum	10%	30%	30%	60%	100%	100%	Max / TLK
Target setelah adendum	10%	30%	30%	60%	100%	100%	
Realisasi	37,61%	68,54%	68,54%	98,86%	127,20%	127,20%	

Capaian kontrak awal	416,17%	230,619%	230,619%	165,093%	127,454%	127,454%	
Capaian Kontrak adendum	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal						
	1c-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Po/KP
Target sebelum adendum	105.403.250	210.806.500	210.806.500	316.209.750	421.613.000	421.613.000	Max / TLK
Target setelah adendum	197.875.000	395.750.000	395.750.000	593.625.000	791.500.000	791.500.000	
Realisasi	115.076.215	791.467.804	791.467.804	1.093.881.134	1.111.472.042	1.111.472.042	
Capaian kontrak awal	109,17%	375,44%	375,44%	345,93%	263,62%	263,62%	
Capaian Kontrak adendum	58,16%	120%	120%	120%	120%	120%	

Note : Target 2021 mencakup saldo PNDS hingga 2017

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Po/KP
Target sebelum adendum	88	88	88	88	88	88	Max / AVG
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	99,20	99,70	99,45	98,76	98,95	98,95	
Capaian kontrak awal	112,73%	113,01%	113,01%	112,22%	112,44%	112,44%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Po/KP
Target sebelum adendum	20%	40%	40%	70%	100%	100%	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	6.717.465.005	18.343.541.030	18.343.541.030	30.917.803.971	49.343.882.548	49.343.882.548	
Capaian kontrak awal	81,92%	111,85%	111,85%	107,73%	120,35%	36,83%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

Note : Target 2021 secara keseluruhan ialah Rp41.000.000.000 dengan rincian Target Pokok Lelang Kelas I Rp27.000.000.000 & Target Pokok Lelang Pegadaian Rp14.000.000.000

K-Wide	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien						
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2021	Po/KP
Target sebelum adendum	-	-	-	-	4,5	4,5	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	-	-	-	-	4,81	4,81	
Capaian kontrak awal	-	-	-	-	106,89%	106,89%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

Note : Target 2021 sebesar 4,5 dengan skala 5

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif						
	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2021	Po/KP
Target sebelum adendum	-	20%	20%	60%	100%	100%	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	-	741	741	921	921	921	
Capaian kontrak awal	-	81,52%	81,52%	101,32%	101,32%	101,32%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

Note : Target 2021 total sebanyak 909 bidang tanah

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif						
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2021	Po/KP
Target sebelum adendum	15%	45%	45%	75%	100%	100%	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	89	246	246	518	518	518	
Capaian kontrak awal	17,18%	47,49%	47,49%	100%	100%	100%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

Note : Target 2021 total sebanyak 518 aset

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif						
	4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2021	Po/KP
Target sebelum adendum	22%	22%	22%	22%	22%	22%	Min / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian kontrak awal	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Note : Target 2021 0,00 % dengan polarisasi Minimize (semakin rendah/mendekati 0,00% artinya capaian semakin baik)

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target sebelum adendum	25%	50%	50%	75%	100%	100%	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	29	40	40	47	50	50	
Capaian kontrak awal	43,90%	97,56%	97,56%	114,63%	121,95%	121,95%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

Note : Target 2021 sebanyak 41 BKPN

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target sebelum adendum	15%	20%	20%	25%	35%	35%	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	78/136	119/208	119/208	152/282	210/430	210/430	
Capaian kontrak awal	339,62%	302,86%	302,86%	215,60%	139,53%	139,53%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

Note : Target 2021 sebesar 35%, capaian total frekuensi lelang sebanyak 430, dengan rincian total lelang laku sebanyak 210, total lelang Tidak Ada Peminat sebanyak 220

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target sebelum adendum	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian kontrak awal	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5d-CP Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Pol/KP

Target sebelum adendum	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Min/ TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	0,15%	1,00%	1,00%	1,00%	0,50%	0,50%	
Capaian kontrak awal	198,81%	192,00%	192,00%	192,00%	196,00%	196,00%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

Note : Target 2021 sebesar 12,5% dengan polarisasi Minimize (semakin rendah/mendekati 0,00% artinya capaian semakin baik)

K-Wide	Edukasi yang Efektif						
	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target sebelum adendum	-	91	91	-	91	91	Max / AVG
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	-	92,44	92,44	-	94,85	94,85	
Capaian kontrak awal	-	101,58%	101,58%	-	104,23%	104,23%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target sebelum adendum	-	40%	40%	-	85%	85%	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	-	$(43+16)/(59+36)$	$(43+16)/(59+36)$	-	$(48+37)/(59+40)$	$(48+37)/(59+40)$	
Capaian kontrak awal	-	62,11%	62,11%	-	85,86%	85,86%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

K-Wide	SDM yang Kompeten						
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target sebelum adendum	15%	40%	40%	75%	100%	100%	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	$(13/34)$	$(23/32)$	$(23/32)$	$(31/32)$	$(31/31)$	$(31/31)$	
Capaian kontrak awal	45,88%	86,25%	86,25%	116,25%	120%	120%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	
-------------------------	---	---	---	---	---	---	--

Note : Selama tahun 2021, dari total 34 pegawai, terdapat 1 pegawai mutasi ke DJP karena IJV, 1 pegawai Tugas Belajar, & 1 Jafung mutasi reguler

K-Wide	Organisasi yang fit-for-purpose						
	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target sebelum adendum	-	-	-	-	-	75	Max / TLK
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	-	-	-	-	90,37	90,37	
Capaian kontrak awal	-	-	-	-	120,49%	120,49%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

K-Wide	Organisasi yang fit-for-purpose						
	9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target sebelum adendum	80	80	80	80	80	80	Max / AVG
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	97,40	98,60	98,00	98,60	99,50	98,53	
Capaian kontrak awal	97,40	98,60	98,00	98,60	99,50	98,53	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Optimal						
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target sebelum adendum	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max / AVG
Target setelah adendum	-	-	-	-	-	-	
Realisasi	100%	100%	100%	100%	96,61%	96,61%	
Capaian kontrak awal	104,71%	104,71%	104,71%	104,71%	101,16%	101,16%	
Capaian Kontrak adendum	-	-	-	-	-	-	



2. TARGET DAN REALISASI KINERJA KPKNL BANDA ACEH TAHUN 2020

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (output) KPKNL Banda Aceh pada tahun 2021 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

Tabel 2-1

Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2021

Kode	IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (25%)							29,38%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							117,53%
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	70,61%	19%	40%	113,879%	113,88%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang	P/M	100%	127,20%	14%	30%	127,202%	120,00%
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	140,00%	14%	30%	140,43%	120,00%
	Customer Perspective (15%)							16,77%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,67%
2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan Negara dan lelang	P/H	88	98,95	11%	44%	112,44%	112,44%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	120,35%	14%	56%	120,35%	120,00%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							106,89%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,5	4,81	21%	100%	106,89%	106,89%
	Internal Process Perspective (30%)							32,20%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							106,93%
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	101,32%	19%	43%	101,32%	101,32%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	100,00%	11%	25%	100,00%	100,00%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,00%	14%	32%	200,00%	120,00%
5	Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							117,17%
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	121,95%	14%	25%	121,95%	120,00%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	48,84%	14%	25%	139,53%	120,00%

5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92,00%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%
5d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	12,5%	0,50%	14%	25%	196,00%	120,00%
6	Penilaian yang berkualitas							104,23%
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	91	94,85%	14%	100%	104,23%	104,23%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							101,01%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	85,86%	14%	100%	101,01%	101,01%
Learning & Growth Perspective (30%)								34,12%
8	SDM yang kompeten							120,00%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	90,37	14%	50%	120,49%	120,00%
9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	98,53	14%	50%	123,16%	120,00%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							101,16%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	96,61%	14%	100%	101,16%	101,16%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								112,47%

Sebagai perbandingan, agar dapat mengukur performa kinerja KPKNL Banda Aceh, kami sajikan capaian KPKNL Banda Aceh pada tahun 2020 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi target pada tahun sebelumnya tentu tidak sama persis dengan IKU di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh tantangan global dan evaluasi secara menyeluruh, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan melalui rencana strategis untuk mencapai kesempurnaan pencapaian visi dan misi DJKN khususnya KPKNL Banda Aceh. Adapun Target dan capaian kinerja KPKNL Banda Aceh pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2-2

Target dan Capaian Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2020

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP Persentase penerimaan Negara dan lelang	100%	108,36%	108,361 %
		1b-CP Tingkat penurunan outstanding piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2016)	3%	3,68%	122,772 %

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		1c-N Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100,00%	100,00%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,45 (skala 5)	4,80	107,87%
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP Persentase hasil lelang (pokok lelang)	100%	36,83%	36,83%
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	87	98,63	113,37%
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100,00%	100,00%
		5b-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKNP	100%	163,46%	163,46%
		5c-CP Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	169,68%	169,68%
		5d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	121,50%	121,50%
6.	Penilaian yang berkualitas	6a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0,27%	199,09%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP Persentase produktivitas lelang	34%	33,96%	99,88%
		7b-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%	100,00%	111,11%
8	Edukasi yang efektif	8a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90	95,41	106,01%
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	80,65%	100,81%
		9b-CP Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%	100,00%	100,00%
10	SDM yang kompeten	10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
11	Organisasi yang fit for purpose	11a-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	90%	100,00%	111,11%
		11c-N indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	93,95	117,44%
12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	98,93%	104,14%

Tabel 2-3
Capaian Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2016 s.d 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Kekayaan yang Diutilisasi	651,82%	141,33%	109,86%	108,66%	169,68%
2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	107,21%	106,64%	105,17%	107,64%	107,87%
3	Rata-rata Persentase Janji Layanan Unggulan	119,09%	119,95%	122,29%	-	-
4	Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu	120%	126,05%	-	-	-
5	Jumlah Piutang Negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah	545,62%	113,11%	490,04%	129,88%	163,46%
6	Tingkat BKPN yang dapat diselesaikan (lunas, ditarik, PSBDT dikembalikan)					
7	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	120%	113,41%	106,29%	102,89%	106,01%

Tabel 2-4
Indikator Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2016-2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (satuan mata uang rupiah)					Total
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal	Nilai Kekayaan Negara Yang diutilisasi	37,5 Milyar	45 Milyar	52,5 Milyar	60 Milyar	12,2 Milyar	207,2 Milyar
2	Pengurusan Piutang Negara dan Pelaksanaan Lelang Yang Optimal	Jumlah PNBP dari Bidang PPN	66.511.413	66.320.836	66.130.259	65.939.682	123.033.914	387.936.104
		PNBP dari bea lelang	560,88 Juta	673.056.000	807.667.200	69.200.640	1.077.064.752	2,6 Milyar
		Piutang Negara yang dapat diselesaikan	830,62 Juta	828,24 Juta	825,86 Juta	823,48 Juta		3,3 Milyar
		Pokok Lelang	8.404.708.520	10.084.080.717	12.100.896.861	14.525.784.753	31.862.635.038	76.978.105.889

Tabel 2-5
 Capaian KPKNL Banda Aceh dalam Renstra KPKNL Banda Aceh 2016-2020

Indikator Utama	Total Target 2016-2020	Target 2020	Capaian 2020
Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi	207.200.000.000	12.211.338.000.000	20.720.577.040.458
Jumlah PNBP dari Bidad PPN	387.936.104	10.159.644	123.033.914
Jumlah PNBP dari bea lelang	2.600.000.000	2.937.000.000	1.077.064.752
Jumlah Piutang Negara yang dapat diselesaikan	3.300.000.000	-	-
Jumlah pokok lelang	76.978.105.889	86.508.000.000	31.862.635.038



3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari evaluasi kinerja terhadap IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJKN Tahun 2021 sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. KPKNL Banda Aceh mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, dan Tingkat Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017).

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Terhadap target sebesar 62%, KPKNL Banda Aceh berhasil merealisasikan sebanyak 70,61% sehingga indeks nilai capaian sebesar 113,88%.
- b. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diperoleh dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara dan PNBPN Lelang. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan

lelang yang dicapai KPKNL Banda Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar Rp15.565.744.196,00 Pencapaian KPKNL Banda Aceh ini patut diapresiasi mengingat target pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.237.000.000,00 atau capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 127,202% dari target. Secara detail diakui, tidak seluruh target PNBPN Tahun 2021 dapat terpenuhi dengan rincian PNBPN Pengelolaan BMN mencapai Rp14.288.320.993,00 atau 133,32% dari target Rp10.717.000.000,00. Kemudian PNBPN Piutang Negara mencapai Rp43.792.105,00 atau 125,12% dari target Rp35.000.000,00 dan PNBPN Lelang mencapai Rp1.293.631.098,00 atau 87% dari target Rp2.937.000.000,00 Semua pencapaian ini adalah pencapaian terbaik yang bisa diusahakan oleh KPKNL Banda Aceh dalam masa Pemulihan Covid-19.

- c. Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017), IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2021, yang bertujuan untuk menurunkan outstanding Piutang Negara secara terukur. Nilai Outstanding BKPN KPKNL Banda Aceh per 31-12-2020 adalah Rp36.641.104.596,50 sehingga target Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017) untuk tahun 2021 adalah Rp791.467.804,00. Pencapaian tahun 2021 adalah sebesar Rp1.111.472.042,00 atau 3,03% dari Nilai Outsanding BKPN atau pencapaian realisasi target adalah sebesar 140,43%. Pencapaian ini tidak lepas dari usaha keras KPKNL Banda Aceh terutamanya Seksi Piutang Negara dalam pencapaiannya, pencapaian penyelesaian ini didapat dari Pelunasan Piutang Negara, Penarikan Piutang Negara dan PSBDT.

Sasaran Strategis II: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dari sasaran Strategis Pengelolaan Lelang Yang Optimal ini, diukur dari seberapa besar pendapatan pokok lelang yang berasal dari Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian. Dari Sasaran Strategis ini KPKNL Banda Aceh mengusung IKU Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) untuk tahun 2021 dengan total target adalah Rp41.000.000.000,00. Dua tahun berturut-turut pokok lelang KPKNL Banda Aceh belum mencapai target pokok, namun tahun 2021 dengan usaha dan kerja keras seluruh pegawai serta memaksimalkan juga strategi agar tercapainya IKU. Akhirnya, capaian IKU atas Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) adalah sebesar Rp49.343.882.548,00 yakni sebesar 120% dari target Tahun 2021. Rincian capaian tersebut adalah Untuk Pokok Lelang Kelas I Rp17.600.011.748,00 atau 65,18% dari target sebesar Rp27.000.000.000,00 dan Pokok Lelang Pegadaian Rp31.743.870.800,00 atau 226,74% dari target sebesar Rp14.000.000.000,00.

Selain itu, terdapat IKU indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan output yang diinginkan oleh stakeholder maupun pihak internal. Pelayanan yang diberikan meliputi Pengelolaan Kekayaan Negara, penilaian, pengurusan Piutang Negara dan pelayanan lelang. Rata-Rata Persentase Pelayanan yang berkualitas, pengukuran difokuskan pada kesesuaian prosedur dan batas waktu penyelesaian yang sesuai dengan janji layanan dalam SOP layanan unggulan. Penyelesaian permohonan dihitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap, terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon dalam kategori selama 21 hari kerja (untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan) dan 35 hari kerja (untuk penilaian dalam rangka pemanfaatan) terhitung setelah tanggal terakhir pelaksanaan survei objek penilaian di lapangan/dilengkapinya data pendukung penilaian oleh pemohon. IKU KPKNL Banda Aceh terkait sasaran Strategis ini adalah Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang, dari target 88 KPKNL telah berhasil mencapai angka 98,95;

Sasaran Strategis III: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan KPKNL Banda Aceh. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra organisasi. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh mengidentifikasi satu IKU, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, yang merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan. Untuk tahun 2021, Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Banda Aceh adalah sebesar 4,81 dengan nilai maksimal 5 dimana target di awal tahun 2021 adalah sebesar 4,50

Sasaran Strategis IV: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengamanan merupakan rangkaian kegiatan pengamanan Kekayaan Negara melalui pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Sementara akuntabel adalah pengamanan kekayaan negara dilaksanakan sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum,

dan tertib pengelolaan, dalam Sasaran Strategis ini KPKNL Banda Aceh memperoleh 3 IKU terkait Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian Yang Efektif dengan rincian:

a. IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

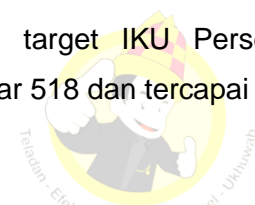
Setelah pada tahun 2020 KPKNL Banda Aceh menoreh keberhasilan dengan penyelesaian target sertifikat tercepat yang diselesaikan sebelum triwulan I tahun 2020 dengan pencapaian penyelesaian 186 sertifikat atau 100% dari target sebanyak 186 sertifikat, tahun 2021 KPKNL Banda Aceh menyelesaikan 921 atau 101,32% dari target 909 sertifikat.

b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara, evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta pelaporan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi, survei, dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data dan analisis data menggunakan aplikasi portofolio aset. Evaluasi Kinerja Aset merupakan salah satu program unggulan DJKN yang harus kita laksanakan. Selain itu, Evaluasi Kinerja Aset merupakan program dengan sistem berkelanjutan, Dengan berlatar belakang permasalahan pengelolaan aset, DJKN melakukan manajemen portofolio aset dan mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pengelolaan BMN secara optimal, DJKN berharap dengan adanya penerapan portofolio aset tahunan, maka akan diperoleh 3 (tiga) manfaat yakni, mengidentifikasi dan mengumumkan K/L yang menggunakan BMN secara kurang optimal; memaksimalkan penggunaan/pemanfaatan BMN berupa lahan/bidang tanah kosong dan/atau idle; mengidentifikasi tanah dan bangunan pemerintah yang memiliki potensi penggunaan/pemanfaatan alternatif yang lebih baik. IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) ini adalah IKU bagi KPKNL Banda Aceh, dan untuk tahun 2021 KPKNL Banda Aceh memperoleh target IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) sebesar 518 dan tercapai 100%

c. Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Dalam target IKU ini KPKNL Banda Aceh merupakan IKU baru yang dimandatkan kepada Seksi Pelayanan Penilaian sejak tahun 2020. Bagi para Penilai Pemerintah di



KPKNL Banda Aceh, tentu ini merupakan hal yang wajar, karena nilai yang dihasilkan dari Laporan-laporan yang telah dibuat merupakan gambaran nilai wajar terhadap objek penilaian. Analisa-analisa dan kajian-kajian yang diasumsikan sesuai dengan kondisi pasar/pendapatan/biaya yang ada merupakan faktor yang mendukung tercapainya iku deviasi ketergunaan hasil penilaian ini. Tahun 2021 KPKNL Banda Aceh memperoleh target sebesar 22% dengan realisasi sampai akhir tahun 2021 tercapai 0% dengan asumsi 100% nilai yang dihasilkan oleh KPKNL dapat dipergunakan oleh satker. Dengan realisasi 0%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang disimpulkan oleh para Penilai dan Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Banda Aceh merupakan dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Sasaran Strategis V: Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

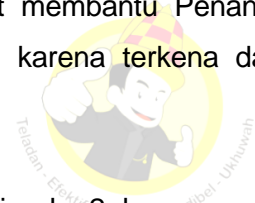
Dalam Sasaran Stategis ini KPKNL Banda Aceh memperoleh 4 IKU terkait Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif dengan rincian:

a. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan Piutang Negara dikatakan optimal apabila tahapan pengurusan Piutang Negara telah dilaksanakan dan menghasilkan tertagihnya/ terselesaikannya Piutang Negara. Berbeda dengan tahun 2020 yang perhitungan IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN ini dihitung dengan persentase dari tiga kategori penyerahan BKPN yang dapat diselesaikan, dimana BKPN Kategori I (s.d. 31 Desember 2010) diberi bobot 1,5; BKPN Kategori II (1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2019) diberi bobot 1 dan BKPN Kategori III (Tahun 2020) diberi bobot 0,5. Tahun 2021 seluruhnya memiliki bobot 1 dan KPKNL Banda Aceh mendapat target IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN Tahun 2021 adalah sebesar 41 BKPN. Dan KPKNL Banda Aceh dapat menyelesaikan sebanyak 50 BKPN dengan target diperoleh pencapaian pesentase 121,95%. Adapun program yang diusung DJKN yakni Crash Program sangat membantu Penanggung Hutang yang tidak mempunyai kemampuan usaha/finansial karena terkena dampak pandemi Covid-19 untuk menyelesaikan utangnya.

b. IKU Persentase produktivitas lelang

Dalam pengukuran IKU Persentase produktivitas lelang ini ada 2 komponen yang dilakukan pengukuran yaitu persentase Lelang laku keseluruhan (Jumlah frekuensi lelang



laku secara keseluruhan dibagi jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan) dan Persentase lelang laku sukarena nilai ≤ 500.000 (Jumlah Frekuensi Lelang Laku Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000 dibagi Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000)

IKU ini ditargetken sebesar 35% dalam tahun 2021. Pencapaian IKU Persentase produktivitas lelang tahun 2021 diperoleh capaian 49% dari target 34% atau 140%.

c. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Dalam pengukuran IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction ini akan mengukur seberapa besar pelaksanaan lelang yang dilaksanakan dengan e-auction dan dengan e-conventional acution. Tentunya harapan semua pelaksanaan telah dengan menggunakan lelang e-auction. Tahun 2021 KPKNL Banda Aceh berhasil melaksanakan IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction sebesar 100% dari target 100%

d. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang besasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi

2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%. Rata-rata realisasi dari deviasi data PNBP Fungsional DJKN sebesar 0,5%. Sehingga, memperoleh nilai 120%.

Sasaran Strategis VI: Penilaian yang berkualitas

Pada sasaran strategis ini, terdapat IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi. Pengukuran Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi dan edukasi eksternal dari

kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Dari target yang telah ditetapkan dengan nilai 91%. Realisasi yang diraih hingga 94,85%.

Sasaran Strategis VII: Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dilakukan untuk mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat digunakan sebagai saran/rekomendasi/bahan perbaikan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Dan untuk mengetahui kepatuhan satker dalam menindaklanjuti persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh pengelola barang serta tindak lanjut dari sisa aset objek penilaian kembali BMN. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh mengidentifikasi IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset. IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset ini dikukur dengan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L ditambah Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L dibagi dengan penjumlahan dari Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020 dan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021 dengan target 85%. Pencapaian target tahun 2021 adalah $((48+37)/(59+40))=85,86\%$ atau pencapaian 101,01%

Sasaran Strategis IX: SDM yang kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Formula IKU ini capaian utama ditambah dengan capaian tambahan. KPKNL Banda Aceh mencapai target maksimalnya yakni 120%.

Sasaran Strategis IX: Organisasi yang fit for purpose

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi. Pada sasaran strategis ini, IKU yang didapatkan KPKNL ada 2 yakni Nilai hasil review pengelolaan kinerja dan indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.

Pada indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator, IKU tersebut Menyenggarakan dan memenuhi penyiapan pelaksanaan FGD Kode etik Pegawai dengan tujuan memperoleh feedback bagi KPKNL untuk melakukan perbaikan. Dari target yang ditetapkan nilai 80 dicapai target hingga 98,53.

Sasaran Strategis X: Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Salah satu pengukuran anggaran berdasarkan output yang dicapai maka salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana/anggaran. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sasaran strategis ini IKU yang didapat KPKNL adalah Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, sehingga dapat diukur tingkat daya serap Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap pagu Belanja Barang dan Belanja Modal serta optimalisasi penyerapan anggaran. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar 96,61% dari target sebesar 95,5%, dengan demikian indeks capaian KPKNL Banda Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar 101,16%

4. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN DALAM PENCAPAIAN TARGET

Secara umum, pencapaian IKU pada tahun 2021 di atas seluruhnya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 berstatus hijau, dengan hasil penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,47% dari nilai maksimal 120%. Pencapaian yang sangat luar biasa adalah pencapaian dari seluruh seksi. Penerimaan PNBPN Piutang Negara yang mampu mencapai Rp143.792.105,00 dari target sebesar Rp35.000.00,00 patut diacungi jempol, karena dalam masa pandemi Covid-19 dimana keadaan tidak menentu dan aktifitas yang dibatasi serta dengan segala kendala dilapangan. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kemampuan membaca situasi dan keadaan, memang posisi keadaan serba sulit akan tetapi dengan adanya program pemerintah Crash Program yakni optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara, KPKNL Banda Aceh bersama penyerah piutang juga memanfaatkan untuk penyelesaian-penyelesaian pengurusan Piutang Negara.

Selain keberhasilan pendapatan PNBPN Piutang Negara, keberhasilan juga dapat diacungi jempol bagi Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Pencapaian Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan, setelah di tahun 2020 berhasil menyelesaikan sertifikasi BMN tercepat dapat diselesaikan seluruh target di Tahun 2020 pada bulan Februari 2020. Tahun 2021 kembali menoreh prestasi dengan target 909 bidang tanah terselesaikan di Q3 sebanyak 921 bidang tanah. Keberhasilan tahun ini juga digenapkan oleh terpenuhinya

target Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) yang selama dua tahun terakhir belum tercapai. Pada Tahun 2021 mampu mencapai target maksimal yakni 120% dari target yang ditentukan. Serta Persentase produktivitas lelang yang juga hanya bisa mencapai 139,54%. Hal ini patut disyukuri karena walau ditengah banyaknya halangan seperti Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi, Konversi Perbankan Konvensional menjadi Perbankan Syariah dan Segmen Pasar/Potensi ekonomi yang kecil, namun target mampu dicapai. Semua ini dikarenakan upaya-upaya maksimal yang terus dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh diantaranya adalah melakukan penggalan potensi lelang untuk jenis lelang yang belum optimal (eksekusi barang rampasan, non eksekusi wajib BMN dan non eksekusi sukarela).

Seksi Pelayanan Penilaian juga menoreh prestasi dengan menjadi tim terbaik sehingga mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan *knowledge sharing* terhadap penugasan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik dan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial tahun 2021 kepada direktur penilaian.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya yang dimaksud bisa berupa Dana maupun Manusia serta Peralatan dan Mesin. Dalam masa pandemi ini penggunaan Sumber Daya mengalami efisiensi yang sangat banyak, selain jumlah pegawai yang harus ada di kantor juga dibatasi dan pelayanan diarahkan dengan pelayanan daring, sosialisasi dengan daring serta untuk kegiatan tatap muka hampir bisa dipastikan sangat dikurangi sekali. Selain Sumber Daya manusia yang telah efisiensi juga berbanding lurus dengan Sumber Daya Dana, dikarenakan sebagian besar Dana APBN disedot untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 sehingga Sumber Daya Dana mengalami penghematan yang cukup signifikan. Serta efisiensi juga berbanding lurus dengan penggunaan Peralatan dan mesin yang juga dibatasi karena banyak pekerjaan yang dilakukan melalui rumah pegawai.

6. ANALISIS ATAS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN

Program Pemerintah PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), **PEN** (Pemulihan Ekonomi Nasional) adalah aksi pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan mendukung dunia usaha (kecil, menengah, korporasi), BUMN dan perbankan untuk bertahan dan bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid 19. Dampak yang bisa diambil dari Program PEN ini adalah penunjang dalam pencapaian target PNBPN Piutang Negara.

Selain itu ada program Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga

Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomio masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam, Mengingat Implementasi Qanun ini berbatas waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, maka setiap orang, badan usaha dan badan hukum yang berada di Aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syari'ah, dan di tahun 2021 ini Bank Konvensional harus sudah menutup kantor operasionalnya di banda Aceh dan berubah ke Bank Syariah. Perubahan ini cukup mempengaruhi dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Banda Aceh, karena perubahan perbankan konvensional ke bank Syariah akan berpengaruh terhadap landasan hukum untuk permohonan lelang, selain itu juga kondisi Covid-19 yang juga menurunkan minat masyarakat dalam membeli lelang.

7. ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah yang diundangkan pada akhir Desember 2018 yang sejatinya baru di implementasikan pada awal tahun 2021 membuat banyak perubahan pada tahun 2021. Namun perubahan target perbankan di Banda Aceh yang segera melakukan perubahan perbankan konvensional ke perbankan Syariah, cukup mempengaruhi kinerja perbankan juga mempengaruhi kinerja KPKNL Banda Aceh dalam pencapaian target Pelaksanaan Lelang. Pada awal-awal berlakunya Qonun Aceh No. 11 Tahun 2018, pihak KPKNL dan perbankan juga telah mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang akan dihadapi jika pemberlakuan Perbankan Syariah di Banda Aceh, diantaranya dengan program percepatan perubahan pengikatan Hak Tanggungan dengan menyesuaikan Perekonomian Syariah, selain itu juga penjjakan perubahan adendum atas Perjanjian Kredit yang sudah terlanjur dibuat dalam koridor Konvensional, namun belum sempet semua rencana aksi dapat dilaksanakan, perubahan perbankan syariah ternyata berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan.

8. RENCANA AKSI

Berkaca dari tahun 2021, KPKNL Banda Aceh menatap dengan yakin akan ada perubahan dan pencapaian target IKU dengan baik, walau naik turun wabah Covid-19 yang belum tau kapan akan berakhir namun pemulihan dan perbaikan terus berjalan. Dampak pandemi yang juga belum selesai sehingga masih perlu perhatian pemerintah untuk segera mencari cara pemulihan Covid-19 tersebut. Namun KPKNL Banda Aceh masih sangat yakin bahwa tahun 2022 ini akan lebih baik dari tahun tahun sebelumnya. Penyesuaian irama kerja dengan New Normal, inovasi-inovasi perlu dimunculkan agar pelayanan publik ditengah pandemi tetap optimal. Sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi nasional yang sedang digalakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat ini terpuruk, KPKNL Banda Aceh juga sangat mendukung program PEN dan tidak mau

ketinggalan dalam membantu mendorong program PEN, salah satunya keyakinan KPKNL Banda Aceh bahwa keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk KPKNL Banda Aceh juga pastinya sangat mendukung program PEN, untuk itu KPKNL Banda Aceh telah menyusun beberapa rencana aksi untuk pencapaian sasaran kinerja dalam mendukung program PEN, yaitu :

- a. Rencana aksi koordinasi dari awal tahun dengan Kantor Pertanahan dan satker, dalam pencapaian target sertifikasi tahun 2022 sebanyak 1.866 bidang dan bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) 147 bidang. Diakui koordinasi dengan kantor pertanahan yang telah terjalin selama ini sangat baik dalam mendukung program sertifikasi BMN terbukti dengan pencapaian sertifikasi terbanyak di tahun 2019 dan penyelesaian sertifikasi tercepat di tahun 2020, juga pada tahun 2021 telah menyelesaikan target 909 bidang sebelum triwulan II berakhir. Selain itu koordinasi dengan satker sebagai penerima manfaat Sertifikasi BMN juga sangat sangat diperlukan, karena tanpa adanya dukungan dari satker-satker penerima manfaat Sertifikasi maka akan sia-sia semua usaha keras KPKNL dan Kantor Pertanahan.
- b. Rencana aksi koordinasi dan sosialisasi dengan pihak perbankan di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh. Tantangan berat perbankan dalam wilayah kerja KPKNL Banda Aceh adalah perubahan dari perbankan konvensional ke perbankan Syariah. Ini tidak hanya perubahan konvensional ke syariah akan tetapi tidak adanya lagi bank konvensional yang beroperasi di Banda Aceh. Ini harus menjadi perhatian khusus bersama, karena permohonan lelang yang banyak sebelum tahun 2021 adalah dari bank-bank konvensional. Selain itu koordinasi dengan satker-satker dan pihak-pihak diluar KPKNL Banda Aceh terkait lelang-lelang lainnya yang dapat digali lagi yang berpotensi, jenis lelang yang akan dioptimalkan di tahun 2022 adalah eksekusi barang rampasan, non eksekusi wajib BMN dan non eksekusi sukarela.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran KPKNL Banda Aceh dengan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2021 adalah sebesar 101,16% atau capaian 96,61% dari target 95%. Pemaksimalan sumber daya yg dimiliki tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan terutama untuk kegiatan yang memerlukan tinjau fisik secara langsung dimana penggunaan anggaran tetap dilakukan secara selektif. Penggunaan anggaran ditelaah digunakan sepenuhnya digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Sasaran Strategis. Penyesuaian-penyesuaian POK juga dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh untuk bisa mewujudkan anggaran yang menunjang kinerja organisasi. Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-015.09.2.537827/2021 tanggal 23 Nopember 2020 adalah sebesar

Rp2.151.982.000 dan setelah terjadi refocusing dan realokasi anggaran sebanyak 4 kali DIPA KPKNL Banda Aceh menjadi Rp1.826.744.000 dengan realisasi sebesar Rp1.714.117.968 atau dengan persentase realisasi atas anggaran sebesar 93,83%.

Adapun realisasi anggaran sebesar 93,83% tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.795.655.000 dengan realisasi sebesar Rp1.683.237.968 atau sebesar 93,74%.

2. Belanja Pegawai

Pada tahun anggaran 2020, terdapat sentralisasi pengelolaan gaji pegawai sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Gaji Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 28 Februari 2020. Sehingga, pada tahun 2021 belanja pegawai disentralisasikan ke kantor pusat.

3. Belanja Modal

Dana yang dianggarkan untuk belanja pegawai pada tahun 2021 adalah sebesar Rp31.089.000 dengan realisasi sebesar Rp30.880.000 atau sebesar 99,33%.

**LAPORAN CAPAIAN IKU
PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		100,00%
1.	Pengelolaan UP	8,00%
2.	Data Kontrak	0,00%
3.	Kesalahan SPM	5,00%
4.	Retur SP2D	5,00%
5.	Hal III DIPA	0,00%
6.	Revisi DIPA	5,00%
7.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
8.	Kinerja Capaian Output	0,00%
9.	Rekon LPJ	5,00%
10.	Perencanaan Kas	0,00%
11.	Realisasi	15,00%
12.	Pagu Minus	5,00%
13.	Dispensasi SPM	5,00%
B) Nilai SMART		0,00%
Capaian Triwulan I		100,00%



**LAPORAN CAPAIAN IKU
PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		100,00%
1.	Pengelolaan UP	8,00%
2.	Data Kontrak	0,00%
3.	Kesalahan SPM	5,00%
4.	Retur SP2D	5,00%
5.	Hal III DIPA	5,00%
6.	Revisi DIPA	5,00%
7.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
8.	Kinerja Capaian Output	17,00%
9.	Rekon LPJ	5,00%
10.	Perencanaan Kas	0,00%
11.	Realisasi	15,00%
12.	Pagu Minus	5,00%
13.	Dispensasi SPM	5,00%
B) Nilai SMART		0,00%
Capaian Triwulan II		100,00%

**LAPORAN CAPAIAN IKU
PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		99,85%
1.	Pengelolaan UP	8,00%
2.	Data Kontrak	0,00%
3.	Kesalahan SPM	5,00%
4.	Retur SP2D	5,00%
5.	Hal III DIPA	4,89%
6.	Revisi DIPA	5,00%
7.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
8.	Kinerja Capaian Output	17,00%
9.	Rekon LPJ	5,00%
10.	Perencanaan Kas	0,00%
11.	Realisasi	15,00%
12.	Pagu Minus	5,00%
13.	Dispensasi SPM	5,00%
B) Nilai SMART		94,45%
Capaian Triwulan IV		96,61%

**LAPORAN CAPAIAN IKU
PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		100,00%
1.	Pengelolaan UP	8,00%
2.	Data Kontrak	0,00%
3.	Kesalahan SPM	5,00%
4.	Retur SP2D	5,00%
5.	Hal III DIPA	5,00%
6.	Revisi DIPA	5,00%
7.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
8.	Kinerja Capaian Output	17,00%
9.	Rekon LPJ	5,00%
10.	Perencanaan Kas	0,00%
11.	Realisasi	15,00%
12.	Pagu Minus	5,00%
13.	Dispensasi SPM	5,00%
B) Nilai SMART		0,00%
Capaian Triwulan III		100,00%



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	537827 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH	PAGU	0	1,795,655,000	31,089,000	0	0	0	0	0	0	1,826,744,000
		REALISASI	0.00%	1,683,237,968 (93.74%)	30,880,000 (99.33%)	0	0	0	0	0	0	1,714,117,968 (93.83%)
		SISA	0	112,417,032	209,000	0	0	0	0	0	0	112,626,032
GRAND TOTAL		PAGU	0	1,795,655,000	31,089,000	0	0	0	0	0	0	1,826,744,000
		REALISASI	(0.00%)	1,683,237,968 (93.74%)	30,880,000 (99.33%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	1,714,117,968 (93.83%)
		SISA	0	112,417,032	209,000	0	0	0	0	0	0	112,626,032



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4700 Legislasi dan Litigasi	PAGU	0	10,566,000	0	0	0	0	0	0	0	10,566,000
		REALISASI	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	10,566,000	0	0	0	0	0	0	0	10,566,000
2	4701 Pengelolaan Keuangan, BUMN, dan Umum	PAGU	0	1,380,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,380,080,000
		REALISASI	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	1,380,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,380,080,000
3	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	PAGU	0	8,328,000	0	0	0	0	0	0	0	8,328,000
		REALISASI	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	8,328,000	0	0	0	0	0	0	0	8,328,000
4	4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	PAGU	0	6,078,000	0	0	0	0	0	0	0	6,078,000
		REALISASI	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	6,078,000	0	0	0	0	0	0	0	6,078,000
5	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	PAGU	0	15,108,000	0	0	0	0	0	0	0	15,108,000
		REALISASI	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	15,108,000	0	0	0	0	0	0	0	15,108,000
6	4798 Pengelolaan Aset	PAGU	0	378,484,000	0	0	0	0	0	0	0	378,484,000
		REALISASI	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	378,484,000	0	0	0	0	0	0	0	378,484,000
GRAND TOTAL		PAGU	0	1,798,644,000	0	0	0	0	0	0	0	1,798,644,000
		REALISASI	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
		SISA	0	1,798,644,000	0	0	0	0	0	0	0	1,798,644,000

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 13-01-22 19:59:15 oleh : 537827



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2021 dengan sangat baik. Seluruh target atas 10 Sasaran Strategis dengan total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Banda Aceh Tahun 2021 dapat tercapai dengan baik, bahkan melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 112,47% dari nilai maksimal 120%.

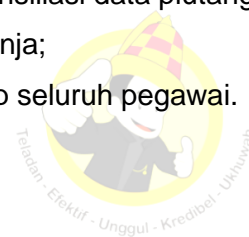
Sebuah prestasi yang harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan terus menerus menuju kesempurnaan.

Sementara itu, total capaian serapan anggaran sampai dengan Desember Tahun 2021 adalah Rp1.714.117.968 dari anggaran sebesar Rp1.826.744.000 atau sebesar 93.83%

FAKTOR PENDUKUNG

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dari satuan kerja yang mulai menyadari tentang arti penting pengelolaan Aset Negara;
2. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
3. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Hubungan yang telah terjalin dengan para stakeholder;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang mulai baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam hal penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu terhadap seluruh pegawai.



KENDALA

Walau demikian, tidak semua yang dihadapi KPKNL Banda Aceh dapat berjalan dengan mudah, selain perubahan yang mendasar dalam pemberlakuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah, selain itu juga terkait penerapan SKPT online yang masih belum berjalan lancar dilapangan, serta masih adanya Covid-19. Secara global kendala-kendala yang akan dihadapi adalah :

1. Perubahan Bank-bank konvensional ke bank syariah yang nantinya berpengaruh atas permohonan lelang yang harus menyesuaikan dengan ketentuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.
2. Pemberlakuan SKPT online yang pada prakteknya dilapangan masih belum seragam di setiap Kantor Pertanahan.
3. Masih besarnya saldo aset eks BRR dan lokasinya tersebar
4. Masih rendahnya tingkat pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang juga disebabkan oleh banyaknya peraturan/ketentuan yang baru, menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dari stakeholder dalam menafsirkan peraturan terkait tugas dan fungsi KPKNL;
5. Keterbatasan dukungan anggaran dan SDM yang mengelola BMN ditingkat satuan kerja;
6. Cukup banyak satuan kerja dan stakeholder yang belum mampu memberdayakan secara maksimal teknologi informasi;
7. Terbatasnya Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Banda Aceh yang menyebabkan pelayanan lelang menjadi kurang maksimal. KPKNL Banda Aceh hanya mempunyai 1 Pelelang Muda dan 1 Pelelang Pertama.
8. Sarana kerja berupa computer banyak yang tidak memadai;
9. Penyampaian dokumen oleh stakeholder yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
10. Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas. Dengan terbatasnya jumlah Pejabat Lelang Kelas I, penetapan jadwal lelang harus benar-benar memerhatikan waktu pelaksanaan, mengingat lama perjalanan dinas luar kota dapat memakan waktu hingga 7 hari;
11. Kuantitas SDM KPKNL Banda Aceh yang belum mencukupi untuk melayani lebih dari 800 satuan kerja.



B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Banda Aceh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Banda Aceh agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, diharapkan KPKNL Banda Aceh dapat lebih fokus dalam menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Banda Aceh adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerjasama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan profesional kepada stakeholder dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Terus melanjutkan proses penyelesaian pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias;
6. Pengusulan pengangkatan Penilai terhadap pegawai yang telah memenuhi syarat;
7. Meningkatkan penggalian potensi lelang, utamanya lelang Barang Milik Daerah (BMD);
8. Penambahan jabatan fungsional pelelang sehingga lelang bisa dilaksanakan lagi lebih focus oleh fungsional pelelang;
9. Melaksanakan koordinasi dengan Pemohon Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II agar dapat meningkatkan frekuensi dan hasil lelang, serta menerapkan *e-Auction*;
10. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya ALE/ALI (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara), AKSIO, serta memberdayakan media sosial yang terintegrasi dengan aplikasi MyKPKNL;
11. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada stakeholder dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;

12. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
14. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
15. Meningkatkan kualitas layanan KPKNL Banda Aceh sebagai tindak lanjut prestasi WBK/ WBBM yang telah diraih padatahun 2014 lalu;
16. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
17. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Banda Aceh secara berkala;
18. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
19. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
20. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara, serta sertifikasi BMN;

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tahun anggaran 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kami berharap LAKIN ini dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh.

Selanjutnya, LAKIN ini semoga dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan stakeholder serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

Kepala Kantor,



Muhammad Indra Kesuma